

Judul : Rujukan BPJS berjenjang dihapus, DPR: terobosan kesehatan meringankan rakyat
Tanggal : Sabtu, 15 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Rujukan BPJS Berjenjang Dihapus

DPR: Terobosan Kesehatan Meringankan Masyarakat

KALANGAN Senayan mendukung rencana Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menghapus sistem rujukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Selama ini, rujukan rumah sakit secara berjenjang merepotkan masyarakat berpenyakit berat.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini mengatakan, sistem berjenjang ini juga memberatkan BPJS Kesehatan karena harus membayar semua rumah sakit secara berjenjang. "Jadi rencana tersebut merupakan terobosan yang meringankan bagi masyarakat," ujar Yahya dalam keterangannya, Jumat (14/11/2025).

Diketahui, Menkes Budi Gunadi Sadikin menginginkan sistem rujukan fasilitas kesehatan dalam BPJS Kesehatan menjadi berbasis kemampuan layanan. Masyarakat akan lebih senang apabila sistem rujukan tidak lagi berjenjang karena biaya layanan kesehatan akan lebih murah dan mempercepat perawatan bagi pasien.

"Pasien enggak usah rujuknya tiga kali lipat, keburu wafat nanti. Lebih baik langsung saja dikasih ke tempat di mana dia bisa dilayani sesuai dengan anamnesis awal," ujar Budi di Gedung DPR, Kamis (13/11/2025).

Budi menilai, sistem rujukan berjenjang menyebabkan pasien harus menjalani perawatan dari fasilitas layanan kesehatan tingkat terendah hingga tertinggi. Padahal, ada jenis-jenis penyakit yang hanya bisa ditangani oleh fasilitas layanan kesehatan pada tingkat tertentu.

Yahya melanjutkan, mulanya rujukan berjenjang bertujuan untuk pemerataan layanan rumah sakit. Hal itu agar semua rumah sakit secara berjenjang menerima pembayaran layanan dari BPJS.

Namun demikian, Yahya tak memungkiri jika terobosan sistem baru tersebut memiliki risiko terhadap ketimpangan pelayanan jika diterapkan secara terus-menerus. Karena akan ada rumah sakit yang minim pasien, sementara fasilitas kesehatan



Yahya Zaini

yang lebih lengkap akan over pelayanan. Sebab masyarakat akan berbondong-bondong berobat ke rumah sakit yang bagus.

Politikus Golkar ini memprediksi, rumah sakit tipe A dan tipe B berpotensi menjadi tujuan utama masyarakat karena memiliki fasilitas lebih lengkap. Sedangkan rumah sakit tipe C bisa mengalami penurunan kunjungan karena pasien memilih fasilitas yang dinilai lebih siap.

Sementara, Direktur Utama

(Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengklaim, pihaknya tidak menerapkan sistem rujukan berjenjang selama ini. Jika seorang pasien membutuhkan layanan dari rumah sakit (RS) tipe A, maka dia tidak perlu dirujuk ke RS tipe C terlebih dahulu. "Cuma BPJS membolehkan, dalam situasi seperti itu langsung ke tipe A," ujar Ali di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Namun, Ali mengingatkan rujukan langsung ke RS kelas atas itu memang harus tergantung pada kondisi medis pasien. "Bila memang pasien membutuhkan perawatan di RS kelas A, maka tidak perlu dirujuk ke RS kelas C terlebih dahulu," kata dia.

Sedangkan, Direktur Jenderal (Dirjen) Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan (Kemkes) Azhar Jaya berjanji akan memperbaiki sistem rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) ke rumah sakit (RS). Bila selama ini pasien dirujuk ke RS berdasarkan jenjang, sekarang rujukan dilaku-

kan berdasarkan kompetensi.

"Jadi pasien akan dirujuk sesuai dengan kebutuhannya. Tidak harus berjenjang, sesuai dengan kebutuhannya," kata Azhar di Gedung DPR, Kamis (13/11/2025).

Menurut Azhar, pasien dari FKTP bisa langsung dirujuk ke rumah sakit manapun sesuai kebutuhannya. Baik itu yang berakreditasi madya, utama, ataupun paripurna.

Namun, ia menekankan rujukan dilakukan tergantung pada kebutuhan medis yang diperlukan oleh pasien sehingga akan terjadi penghematan dalam pembiayaan. "Karena pasien kalau sudah dirujuk maka diharapkan selesai, tidak dirujuk-rujuk lagi," ujar dia.

Dengan itu, kata Azhar BPJS Kesehatan hanya perlu membayar satu rumah sakit dan tidak perlu membayar rumah sakit lainnya. Karena sudah dapat rujukan, rumah sakit tersebut mesti melayani secara tuntas.

"Ini yang kita namakan dengan rujukan berbasis kompetensi," pungkas Azhar. ■ TIF